



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

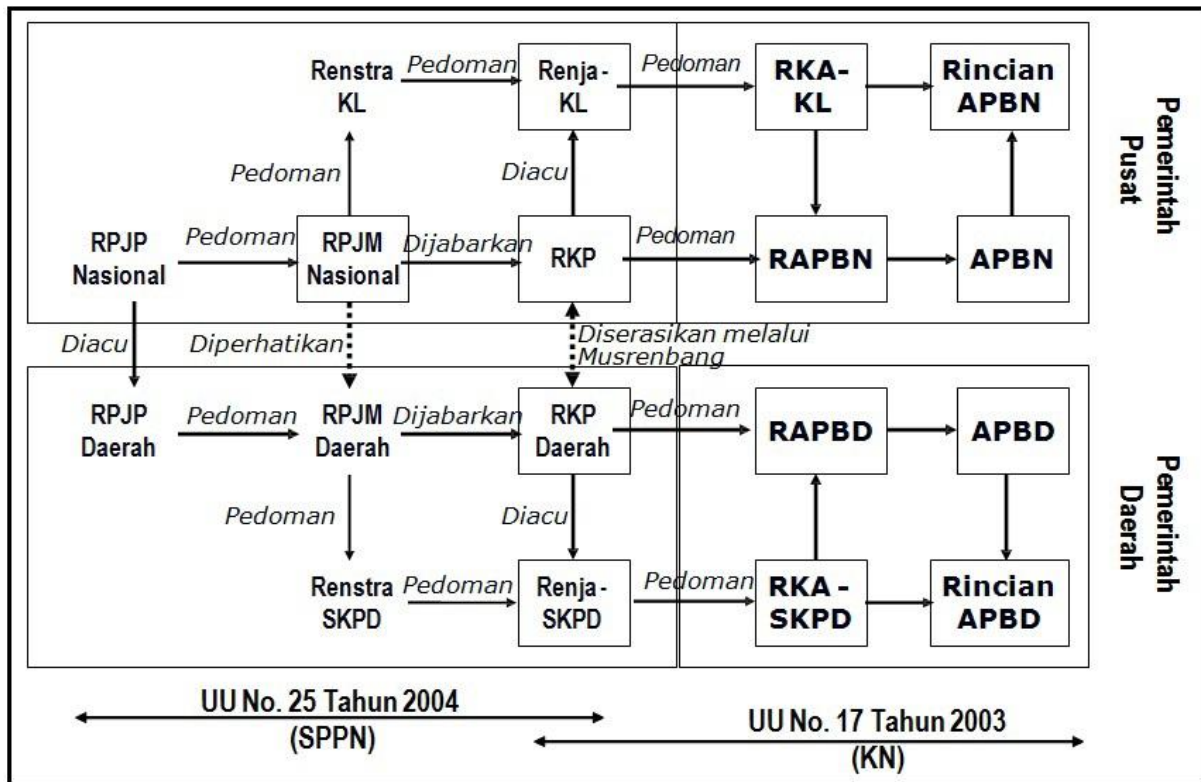
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- m. Peratuan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024,
2. evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

[illegible]

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*)	(11) = (10/4)
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100	100	100	100	100	100	100
04.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	6					3	3	50.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	80	81,69	80	80,20	100.25	81	81	81
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01, 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28		5	5	100	7	12	42.86
7.01.01.2.01, 07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		5	5	100	5	10	50.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*)	(11) = (10/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	100	80	100	125	100	100	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400		19	19	100	20	36	2.57
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48		12	12	100	12	24	50.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88		22	22	100	22	44	50.00
7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	80	100	125	100	100	100
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12		4	4	100	4	8	66.67
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	80	79.53	80	100	125	100	100	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16		4	4	100	4	8	50.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*	(11) = (10/4)
7.011.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4	4	100	4	8	200.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16		4	4	100	4	8	50.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16		4	4	100	4	4	25.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48		12	12	100	12	24	50.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650		61	61	100	40	101	25,25
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2		1	1	100	1	2	100.00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4		1	1	100	1	2	50.00
7.01.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8		3	3	100	2	5	62.50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*)	(11) = (10/4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20		5	5	100	5	10	50.00
7.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48		12	12	100	12	24	50.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16		4	4	100	4	8	50.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16		5	5	100	5	10	62.50
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32		8	8	100	8	16	50.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*)	(11) = (10/4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12		3	3	100	3	6	50.00
07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92	94.88	90	100	111.11	90	100	100
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	92	90	90	100	111.11	100	100	100
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16		4	4	100	4	8	50.00
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29	-	7	7	100	11	18	62.07
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100	90	90	100	111.11	100	100	100
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8		2	2	100	2	4	50.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*)	(11) = (10/4)
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	100	100	100	100	100	90	100	100
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40		8	8	100	10	18	45.00
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48		24	24	100	25	49	102.08
07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	88	100	88	100	100	100	100	100
07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12		4	4	100	5	9	75.00
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	100	100	100	100	90	100	100
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9) atau (10)=(9)*)	(11) = (10/4)
07.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20		12	12	100	5	17	85.00
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	90	100	100
07.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12,000		70	70	100	50	120	1.00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Tidak Ada	

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
	Gelar Budaya Jogja	Kerjasama yang baik antar stakeholder (Pelaku Seni dan budaya, UMKM, Pelaku pariwisata, Kalurahan, Kapanewon, Forkompinkap)
		Tersedianya anggaran
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
	Penerapan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kerjasama yang baik antara aparat kapanewon, kalurahan, dan OPD terkait
		Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.
		Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara ASN dan Non ASN kapanewon
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara pejabat struktural di kapanewon
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
		Pendampingan dari Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Tapem.
		Adanya regulasi peraturan yang menjadi acuan.
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kapanewon
		Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pejabat struktural Kapanewon
		Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan;
		Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencanaanya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dilaksanakan berdasarkan inventarisasi BMD yang harus diperbaiki dan kepedulian akan kelayakan BMD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencanaanya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
		Kepedulian pengguna Kendaraan Dinas akan kelayakan kendaraan dinas yang dipakainya.
		Tersedianya rekanan yang berpengalaman;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. Inventarisasi gedung yang memerlukan perbaikan.
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa, kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kerjasama yang baik antar petugas di Kapanewon
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan; Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;; Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa; Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
		Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat, UMKM, Obyek wisata alam, Obyek wisata sejarah, kawasan kuliner.
		Kerjasama yang baik antar instansi di kapanewon
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada di kapanewon (masyarakat, pelaku UMKM, kalurahan)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya anggaran
		Kerjasama yang baik dengan masyarakat, pelaku UMKM, Kalurahan
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon Kretek)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kerjasama yang baik antar instansi se-Kapanewon
		Terjalannya komunikasi intensif pengampu trantibum.
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar dan kerjasama yang baik antar Stakeholder di Kapanewon (sekolah, forkompinkap, kalurahan, OPD se-Kapanewon)

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;

8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertikal dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan;
9. Meningkatkan fungsi pendampingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Kretek berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	IKU sesuai Renstra 2021-2026:						
	IKM Kapanewon	Indeks	92,83	95,59	95,52	95,75	
	IKU sesuai Rancangan Renstra 2025-2029						
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,70	3,80
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	92,20	92,41

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Kretek Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
3. Tersedianya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan
4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Kapanewon Kretek merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta urusan keistimewaan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan		Kelemahan	
1.	SDM yang beragam;	1.	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM di Kapanewon;
2.	Kompetensi dan Integritas yang baik;	2.	Kinerja OPD masih belum maksimal
3.	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana;	3.	Anggaran dan sarana prasarana belum bisa memenuhi semua kebutuhan di Kapanewon karena pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja asset yang terbatas;
4.	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon;	4.	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah;
5.	Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul.	5.	Keselarasn komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon yang belum maksimal.
6	Usulan penambahan dan diklat PNS;	6	Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat;
7	Adanya dukungan perangkat dan jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;	7	Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal;

Kekuatan		Kelemahan	
8	Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan;	8	Pendampingan dan fasilitasi dari kapanewon terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kurang intens, tidak terjadwal rutin.
9	Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;	9	Akses permohonan pembangunan masyarakat bisa lewat berbagai akses, pembangunan dari PIK,Dais, Kalurahan, atau sumber lain harus dikoodinasikan/diidentifikasi terlebih dulu, agar kegiatan yang dilaksanakan tidak sama atau tidak dalam lokasi/sasaran yang sama.
		10	Keterbatasan akses kewilayahan hanya pada fasilitasi dan koordinasi
		11	Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
		12	Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang		Tantangan/Ancaman	
1.	Adanya Dana Desa/Kelurahan;	1.	Pelanggaran aturan dan ketentuan; Masih terjadi gangguan kamtibmas
2.	Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);	2.	Terbengkalai obyek wisata, sehingga tidak mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat
3.	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan, maupun pengelolaan pemerintahan.	3.	Potensi kerawanan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)
4.	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	4.	Gesekan kepentingan antar masyarakat;
5.	Program pembangunan kewilayahan OPD	5.	Potensi wisata sejenis yang banyak terdapat di daerah lain.
6.	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	6.	Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.
7.	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon (Obyek wisata alam, sejarah/religi, sentra kuliner)	7.	Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
8.	Potensi produk-produk unggulan setempat, banyak terdapat pelaku		

Peluang		Tantangan/Ancaman	
	UMKM (Makanan mentah, kerajinan tangan, dll)		
9.	Pengembangan Obyek Wisata disepanjang Pantai dan Pembangunan JLS		

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis teknologi informasi dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana aset daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;
5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat Kalurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kretek Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Kretek	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Kretek	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100,000,000	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan		-	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100 persen	100,000,000	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		-	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100,000,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Kretek	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	100 persen	113.715.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kap. Kretek	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	100 persen		
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	83 Persen				Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA pada ASN di Kabupate n Bantul	82 Persen		
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50,000,000	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan			
2	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	2 dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	-	Diganti dengan Subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3	Perencanaan dan Pengendal ian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	63.715.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	35.996.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	7 dokumen	63.715.000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	-	-	Diganti dengan Subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-	-	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	35.996.000	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Kretek	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	3.578.903.829	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kap. Kretek	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,25 angka 95,76 indeks	3.612.240.592	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	7.200.000	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.600,000	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.600,000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2.643.243.829	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	3.154.609.137	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.591.043.829	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	3.100.009.137	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	47.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	52.800,000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.800.000	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	2.125.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	2.700.000	
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.125.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2.700.000	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	402.179.960	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	102.265.243	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.501.852	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.177.311	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.673.580	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.179.980	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.299.500	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	241.925.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	21.250.000	
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	20,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	4.057.000	
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	8.075.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	140,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 persen	7.200.000	
19	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit	7.200.000	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	90,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	156.355.020	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	167.262.112	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	25.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.325.560	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	23.886.000	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	106.655.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	115.050.552	Penyesuaian UMR Honor Non ASN

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	220.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	171.004.100	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	132.028.500	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	40,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	38.975.600	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Kretek	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 persen	250,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kap. Kretek	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 persen	26.950.000	
11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100 persen	155,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100 persen	16.525.000	
26	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	40,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	6.250.000	
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	115,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	10.275.000	
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100 persen	95,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100 persen	10.425.000	
28	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	95,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	10.425.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Kretek	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	87 persen	341,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kap. Kretek	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	87 persen	117.580.000	
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	100 persen	191,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	100 persen	87.192.500	
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakata n	22.001.000	
30	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	171,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	65.191.500	
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	150,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	30.387.500	
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	150,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	30.387.500	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Kretek	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	92 persen	315,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kap. Kretek	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	92 persen	6.850.000	
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	315,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	6.850.000	
32	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	315,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	6.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Kretek	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kap. Kretek	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	136.317.500	
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	136.317.500	
33	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	50,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	136.317.500	Tambahan untuk Kegiatan HUT RI, sebelumnya masuk di Program Ketertiban Umum
	JUMLAH				4.648.618.829					4.035.934.092	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Kapanewon Kretek.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	milennial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Kretek Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya masing-masing;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Kretek;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon		Indeks pelayanan publik kapanewon	indeks	n/a	3,70	3,80
		Meningkatnya kualitas tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon	Indeks kualitas pelayanan di Kapanewon	indeks	n/a	92,20	92,41

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bantul

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Kapanewon Kretek						4.035.934.092,00							4.135.237.841,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00								100.000.000,00		
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00								100.000.000,00		
1	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-			100 persen	100.000.000,00						-	100.000.000,00			
	2	2	0	8	5. 07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-			100 persen 100 persen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	-	-	100.000.000,00			
	2	2	0	8	5. 07	Gelar Budaya Jogja																
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	-		100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.996.000,00							40.000.000,00			
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00								40.000.000,00		
2	4	0	0	4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			100 persen	35.996.000,00						-	40.000.000,00			
	4	0	0	4	5. 01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	-			100 persen	35.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan	-	40.000.000,00			
	4	0	0	4	5. 01	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	35.996.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan		40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK				
		7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.899.938.092,00							3.995.237.841,00					
		7	01				KECAMATAN					3.899.938.092,00								3.995.237.841,00				
3		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-		80.25 angka 95.76 indeks	3.612.240.592,00						-	3.637.237.841,00					
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-		100 persen	7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	-	10.300.000,00					
		7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		4.000.000,00	KAPANEWON KRETEK				
		7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	3.600.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		6.300.000,00	KAPANEWON KRETEK				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon		3.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum kapanewon	-		100 persen	102.265.243,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	-	112.500.000,00	
	7	0 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.501.852,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.177.311,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	8.673.580,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		9.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.299.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		7.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	21.250.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		23.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.363.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				00 Dokumen	0,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			100 persen	7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	-	15.000.000,00	
	7	0 1	0 1	2. 07	00 05	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	7.200.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	167.262.112,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	-	153.428.704,00	
	7	0 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.325.560,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		25.200.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	23.886.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	115.050.552,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		108.228.704,00	KAPANEWON KRETEK
	7	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			100 persen	171.004.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	-	185.000.000,00	
	7	0 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional			Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	132.028.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		135.000.000,00	KAPANEWON KRETEK				
		7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	38.975.600,00	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek		50.000.000,00	KAPANEWON KRETEK				
4		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	-		80 persen	26.950.000,00						-	43.000.000,00					
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-		100 persen	16.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompim kap, kapanewon dan kalurahan	-	28.000.000,00					
		7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	6.250.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompim kap, kapanewon dan kalurahan		8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK				
		7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	10.275.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompim kap, kapanewon dan kalurahan		20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			100 persen	10.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon	-	15.000.000,00				
		7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	10.425.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon		15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK			
5		7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	-			100 persen	117.580.000,00						-	165.000.000,00				
		7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			100 persen	87.192.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon	-	125.000.000,00				
		7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyara katan	22.001.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon		25.000.000,00	KAPANEWON KRETEK			
		7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	65.191.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon		100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			100 persen	30.387.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon	-	40.000.000,00	
	7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	30.387.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon		40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
6	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-			100 persen	6.850.000,00						-	10.000.000,00	
	7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			100 persen	6.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon	-	10.000.000,00	
	7	0	0	2.	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	6.850.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon		10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 persen	136.317.500,00						-	140.000.000,00	
	7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	-			100 persen	136.317.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon	-	140.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	0	0	2.	00	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	136.317.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyaraka t kalurahan dan kapanewon		140.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	
	J U M L A H											4.035.934.092,00							4.135.237.841,00		

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.


Panewu Krotek
Cahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001